

**Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir
Dampak Pembangunan Waduk Kedungombo**
*Social Change of Downstream Triangle Community
as an Impact of Kedungombo Dam Development*

Gunanto Surjono

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Badiklit Kesos,
Kementerian Sosial RI. Jl Kesejahteraan Sosial No 1, Nitipuran, Yogyakarta, Indonesia. Telpn (0274) 377265.
E-mail gunsuryo@yahoo.com. Diterima 9 Februari 2015, direvisi 20 Maret 2015, 17 April 2015.

Abstract

This research is done to describe social change on the community living at downstream triangle of Kedungombo water reservoir; Central Java. Approaching model used in this research is quantitative-descriptive, which is implemented through informants choosing, gathering and analyzing data techniques as follows: Informants are chosen purposively those who saw and experienced their changing environment, from piece of farm land to water reservoir (dam). Data are gathered through interview with informants through snowball technique. The research finds that a significant change happens to the downstream triangle community during 25 years of their environmental change on the aspect of communal economy, family system, relation with local government, and local belief.

Keywords: *Social Change; Community; Downstream Triangle*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perubahan sosial pada komunitas masyarakat di daerah segitiga hilir waduk Kedungombo, Jawa Tengah. Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yang diimplementasikan melalui teknik pengumpulan data wawancara, pemilihan informan secara purposif dengan jumlah yang ditentukan secara snowball terhadap informan yang mengalami perubahan alam lingkungan dari semula hamparan tanah pertanian ke air waduk irigasi. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sosial terjadi dalam masyarakat segitiga hilir dalam aspek ekonomi lokal, sistem kekeluargaan, hubungan dengan pemerintah setempat, dan kepercayaan yang dianutnya setelah perubahan alam lingkungan berlangsung selama 25 tahun.

Kata Kunci: *Perubahan Sosial; Komunitas; Segitiga Hilir*

A. Pendahuluan

Pengalaman menunjukkan, bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara yang semula direncanakan secara matang untuk kesejahteraan masyarakat, sering menimbulkan dampak perubahan sosial negatif tidak terduga (*unintended impact*) bagi masyarakat tertentu. Pembangunan waduk Kedungombo di Jawa Tengah, yang semula direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lahan-lahan pertanian baru beririgasi teknis juga telah menimbulkan masalah kontroversial antara pemerintah dengan masyarakat desa yang tinggal di wilayah

pusat genangan. Disebut kontroversial karena pelaksanaan pembangunan waduk Kedungombo tidak semulus pembangunan waduk Jatiluhur, Purwakarta; Sempor, Kebumen; Gajahmungkur, Wonogiri; Wadaslintang, Wonosobo; dan Karangates, Malang. Sejak waduk Kedungombo mulai dioperasikan tahun 1989 dengan meninggalkan permasalahan bagi masyarakat terdampak yang belum tuntas benar,¹ ada beberapa perubahan sosial terjadi pada masyarakat yang tempat tinggalnya terkena sasaran proyek. Masyarakat tersebut adalah mereka yang tinggal di sebagian wilayah kecamatan Kemusu, Boyolali; kecamatan Geyer, Grobogan; dan kecamatan

an Sumberlawang, Sragen (disebut kemudian dengan masyarakat Segi Tiga Hilir).²

Waktu telah melintas selama 25 tahun sejak Waduk Kedungombo praktis digenangi pada tahun 1989, masyarakat yang memilih bertahan di sekitar genangan telah melakukan adaptasi berkaitan dengan perubahan lingkungan yang semula tanah pertanian ke hamparan air waduk, sehingga pola matapencaharian, hubungan sosial, mobilitas mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian tentang perubahan sosial masyarakat di wilayah segitiga hilir (sekitar genangan waduk). Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauhmana perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di wilayah segitiga hilir dan apa makna subjektif keberadaan Waduk Kedungombo yang telah 25 tahun melingkungi kehidupan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan sosial sehubungan dengan perubahan alam lingkungan masyarakat wilayah segitiga hilir dari semula tanah pertanian ke air waduk dan segala konsekuensinya bagi mata-pencaharian, hubungan sosial, dan mobilitas kehidupan mereka.

B. Metode Penelitian

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan implementasi teknis pemilihan informan, pengumpulan dan analisis data sebagai berikut. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, dalam arti memilih kategori informan di wilayah segitiga hilir yang mengetahui dan mengalami perubahan lingkungan di wilayahnya sejak sebelum dan sesudah dijadikan waduk.

Pemilihan informan ditentukan secara *snow ball*, dalam arti tidak menentukan jumlah, tetapi kemudian dihentikan ketika data yang diperoleh dari informan dipandang sudah memenuhi tujuan penelitian. Pengumpulan data utama dilakukan dengan teknik wawancara dengan informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif yang meliputi aspek perubahan mata-

pencaharian, hubungan sosial, dan pola mobilitas masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan (Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir)

Hubungan antarsistem yang teratur, seimbang, dan bersatu, kemudian membawa ke arah pemahaman sekilas, bahwa masyarakat yang dipahami menurut fungsionalisme struktural cenderung stabil dan statis. Namun Parsons (2014: 230-231) menegaskan, bahwa *teori tindakan* sama-sama memperhatikan antara persyaratan stabilitas dan perubahan, karena dalam mempelajari mekanisme stabilitas juga harus mempelajari mekanisme pengubah, pemahamannya dapat dilakukan melalui struktur.

Dalam tujuh ciri umum tentang fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Van Den Berghe (dalam Demerath, 2011: 294-295) terdapat dua ciri yang menyangkut perubahan sosial. Pertama, perubahan berlangsung secara lambat dan lebih merupakan penyesuaian diri. Kedua, perubahan sebagai hasil penyesuaian terhadap apa yang terjadi di luar masyarakat bersangkutan, melalui penemuan internal. Neil Smelser (dalam Cuff et. al, 2014: 61) berpendapat, karena berbasis pada kestabilan dan keteraturan tersebut biasanya perubahan sosial dalam konsep fungsionalisme struktural selalu dimulai dengan ketegangan (*strain or tension*) antaranggota dalam komunitas.

Neil Smelser (Cuff, et. al., 2014: 61), masih dalam konteks pengembangan persepsi fungsionalisme struktural memandang perubahan sosial berpendapat, bahwa adanya kebutuhan akan kegiatan produksi yang tidak memadai lagi yang kemudian mendorong perubahan sistem pada struktur sosial masyarakat. Namun perubahan tersebut tetap dikendalikan oleh sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, sementara menurut Talcott Parson (Ritzer, 2011: 245), bahwa perubahan pada *personality system* sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya masyarakat tempat *personal* tersebut berada, yang dipersatukan oleh norma, nilai, dan moral

yang dianut secara umum oleh masyarakat bersangkutan (Ritzer, 2011: 266).

Dalam kumpulan laporan tentang indikator sosial untuk pengembangan manusia (human development) yang dilakukan oleh *UNO for Social Condition* (1976) dan Sheldon Moore (2010: 57) diperincikan, bahwa indikator sosial meliputi aspek: kependudukan, lingkungan, ilmu dan teknologi, seni dan kebudayaan, pekerjaan, jam kerja, pendapatan dan pengeluaran, ketimpangan dan stratifikasi sosial, produksi dan konsumsi, aktivitas politik, hiburan, media massa, hukum dan kriminalitas, agama dan sistem kepercayaan, nilai, etika, dan hubungan antarkelompok sosial (Miles, 2010: 138-139).

Prakondisi: Dari data sekunder³ yang diambil dari 370 kepala keluarga diketahui, bahwa mata pencaharian masyarakat Segi Tiga Hilir sebagian besar adalah bertani (79 persen), pedagang hasil bumi (12 persen), dan sisanya (9 persen) sebagai pekerja di sektor formal pemerintahan. Dari keterangan informan, 85 persen masih bagian dari keturunan Etnis Samin, yang persebaran kehidupannya meliputi kawasan pegunungan Kapur Utara (sebagian kabupaten Blora, Cepu, Rembang, Boyolali, dan Sragen). Meskipun telah melewati beberapa generasi hidup bersosialisasi dengan masyarakat Jawa pada umumnya, jalinan batin antarsesama etnis Samin masih sangat kuat.⁴

Masyarakat Segi Tiga Hilir memakai bahasa komunikasi, cara berpakaian, dan alat kehidupan sehari-hari tidak berbeda dengan yang digunakan masyarakat Jawa pada umumnya yang tinggal berdekatan dengan mereka. Hal yang membedakan dengan masyarakat Jawa pada umumnya adalah sikap hidupnya yang keras, ulet, kritis, solider, dan spontan sehingga tampak menonjol sebagai struktur komunitas sosial tersendiri. Kebanyakan mereka hidup tenggang menenggang di sektor ekonomi pertanian berlahan kering. Lima sungai besar yang mengalir di kawasan dekat tempat tinggal masyarakat Segi Tiga Hilir (Serang, Lusi, Tuntang, Jragung, dan Juwana) tidak dapat memberi kemudahan irigasi tanah pertanian pada mereka disebabkan lahan perta-

niannya berada di lereng-lereng bukit (*slope hill farming*) sehingga aliran air sungai tidak dapat terangkat ke atas. Kemanfaatan kelima sungai besar bagi masyarakat Segi Tiga Hilir hanyalah hasil ikan, yang menjadi sumber nafkah mayor setelah penghasilan minor dari sektor pertanian tadah hujan.

Masyarakat desa segitiga hilir memiliki pola kerja tidak seperti masyarakat desa pada umumnya di Jawa, yang pada waktu tenggang kerja di sawah pergi berurbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan, masyarakat Segi Tiga Hilir tidak suka mencari pekerjaan di kota (urbanisasi) tetapi tetap bertahan di desa kecuali ke kota untuk menjual hasil ikan yang mereka tangkap dari Waduk Kedungombo. Mereka tidak acuh terhadap pekerjaan formal sehingga jarang yang berminat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Sikap tidak acuh terhadap kehidupan formal tersebut dapat dirunut dari sikap beberapa generasi sebelumnya, yang tidak mau tunduk pada kekuasaan kerajaan Surakarta dengan tidak mau membayar pajak, tidak mau kompromi dengan pemerintahan Hindia Belanda (di lain pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri memang kurang berminat menguasai kawasan yang menjadi tempat tinggal masyarakat Segi Tiga Hilir karena daerahnya kurang produktif). Setelah kemerdekaan, meskipun mereka mengakui pemerintahan republik, mereka masih sering menunjukkan sikap kritis terutama apabila menghadapi kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasinya.

Sistem Keluarga: Sistem pembentukan keluarga baru melalui perkawinan di kalangan masyarakat Segi Tiga Hilir masih lebih mengutamakan memilih pasangan hidup dari sesama (internal) Etnis Samin. Masing-masing satuan keluarga memiliki catatan jelas dalam ingatan yang selalu di ceritakan pada generasi berikutnya tentang garis keturunan mereka, mirip dengan sistem perkawinan keluarga Kalang di Kotagede, Yogyakarta.⁵ Kepala keluarga, lelaki, masih berfungsi menjadi penentu utama tanggung jawab, kebijakan, dan arah ketaatan dalam hubungan fungsional anggota keluarga dan dengan anggota

komunitas masyarakat lain. Meskipun demikian, hubungan fungsional suami-isteri, ayah-ibu-anak, dan antara saudara menyamping sangat egaliter, spontan, dan lugas. Hubungan fungsional yang egaliter ini diekspresikan dengan sistem komunikasi yang tidak menggunakan bahasa *andhap-asor* (*stratified language*) seperti bahasa yang digunakan masyarakat Jawa di lingkungan Keraton, tetapi menggunakan bahasa *ngoko*, bahkan dengan orang luar yang baru beberapa saat dikenalnya pun mereka dengan cepat berubah menggunakan bahasa *ngoko*, sehingga cepat terbangun suasana akrab dan egaliter.

Masyarakat Segi Tiga Hilir mengartikan keluarga lebih *extended*, meliputi hubungan horisontal dan vertical. Hubungan fungsional antaranggota keluarga sangat terbuka, dalam arti cepat dan mudah mengekspresikan kekecewaan dan kepuasannya, kebencian dan kesenangannya, dalam interaksi sehari-hari. Sumber dan akumulasi penghasilan keluarga ditumpukan pada satu orang, yaitu kepala keluarga, dan anggota keluarga yang lain meskipun sudah mampu bekerja sendiri (kecuali kalau sudah menikah) cukup meminta sepanjang ada kebutuhan. Fungsi ayah-ibu menafkahi, mendidik, dan melindungi serta mengawasi sosialisasi anak (William J. Goode, 1991: 186) dalam bayang-bayang kendali norma kakek-nenek. Konkretnya, kakek dan nenek, masih dirasa oleh cucu-cucunya memiliki kedekatan hubungan batin tidak ubahnya dengan ayah-ibu mereka sendiri, yang nasihat, petuah, dan restunya dipandang sebagai sesuatu yang harus diperhatikan oleh generasi yang lebih muda.

Sistem tersebut diungkapkan dengan panggilan *Pak Tuwo dan Mbok Tuwo* kepada kakek-neneknya, dan biasanya ketika ekonomi ayah-ibunya belum mapan (masih keluarga muda) pengasuhan anak masih dipegang oleh kakek-neneknya, sedang fungsi anak adalah membantu pekerjaan orangtua sampai kemudian menikah dan hidup mandiri. Fungsi “membantu” tersebut yang kemudian membawa konsekuensi anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena mereka berpendapat bahwa pekerjaan di sektor pertanian

tidak memerlukan orang dengan pendidikan tinggi.

Sistem Ekonomi dan Kemasyarakatan:

Meskipun masyarakat Segi Tiga Hilir telah melewati beberapa generasi, tetapi masing-masing satuan keluarga masih memiliki lahan tanah yang cukup untuk menafkahi secara subsistens keluarga mereka. Satuan keluarga yang tidak memiliki cukup lahan untuk menghidupi keluarga biasanya bekerja pada satuan keluarga yang memiliki lahan lebih luas. Perbandingan pemilikan tanah sebagai alat produksi antara keluarga yang paling luas tanah pertaniannya dengan keluarga yang paling sempit tanah pertaniannya di bawah kelipatan enam, yang menurut Svalastoga (2013: 86) berperan besar pada sikap egaliter hubungan fungsional antaranggota masyarakatnya.⁶

Satuan keluarga yang masuk kelompok berlahan lebih luas adalah mereka yang lepas dari *mainstream* sikap hidup Masyarakat Segi Tiga Hilir, yaitu menjadi pegawai negeri, atau pedagang hasil bumi. Kelompok tersebut berfungsi sebagai katup pengaman ekonomi bagi satuan keluarga berlahan sempit dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir, melalui penyediaan kesempatan kerja dalam pengelolaan sawah atau pada satuan keluarga berlahan sempit, atau menggarap sawah dengan sistem bagi hasil. Sistem pengupahan dalam hubungan kerja di sektor pertanian diwujudkan dalam bentuk *bawon* (bagian tertentu yang diberikan pekerja berdasarkan prestasi petik) khususnya di masa panen, pada masa garap diwujudkan dalam jaminan makan dua kali sehari ditambah dengan uang sekadarnya yang jauh dari standar upah di kota.

Apabila pemilik sawah ingin menjual hasil panennya (*tebas*) kepada pedagang, pekerja yang semula ikut menggarap mendapat hak bagian kecil dari penjualan, sepadan dengan jumlah *bawon* yang biasanya didapat, meskipun pekerja bersangkutan tidak ikut memanen tetapi karena ikut menanam dan mengelola sehingga mereka tetap mendapatkan hak atas hasil panen akhir. Apabila pemilik ingin memanen sendiri, pekerja penggarap tetap mendapat hak *previlige* bagian khusus dari *bawon* dibandingkan dengan

pekerja pemanen yang sejak awal tidak pernah terlibat dalam pengerjaan sawah. Hubungan kerja dengan sistem tukar jasa tenaga kerja, seperti konsep Sosrodihardjo (2011: 91), juga masih dilakukan masyarakat Segi Tiga Hilir, terutama bagi mereka yang memiliki lahan tanah setingkat, dengan pertimbangan apabila mereka saling tukar tenaga (*reciprocal*) pekerjaan di sawah akan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Sistem barter (*urup-urup*), yaitu menukar hasil panen dengan makanan jadi (siapa makan) juga masih dikenal masyarakat segitiga hilir. Hubungan kerja ini tidak dapat dilakukan dengan baik manakala masyarakat Segi Tiga Hilir bekerja sama dengan masyarakat luar, karena berangkat dari tradisi ekonomi pertanian lokal yang berbeda.⁷

Kelompok pemberi kerja dan pekerja, dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir tidak dikenal diferensiasi sosial. Sebutan kelompok elit seperti konsep Chambers (2013: 25) untuk menyebut satuan keluarga dalam masyarakat yang berlahan luas dan pedagangnya sebenarnya tidak tepat, karena hubungan fungsionalnya dengan satuan keluarga berlahan sempit sangat egaliter. Sikap egaliter tersebut dicerminkan dengan adanya kebebasan dari warga biasa untuk ikut menikmati barang-barang mewah (untuk ukuran desa) yang dimiliki oleh satuan keluarga berlahan luas seperti televisi, sepeda motor, mobil, traktor, pada saat-saat tertentu membutuhkan,⁸ sehingga yang dikenal dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir lebih tepat kalau disebut stratifikasi sederhana tetapi fungsional dan kolektif.

Struktur Sosial yang terstratifikasi secara fungsional ini tampak dari cara masyarakat Segi Tiga Hilir mengelola organisasi ekonomi desa, yang disebut *Lumbung Paceklik* dalam organisasi tersebut keluarga berlahan pertanian lebih luas membayar iuran padi lebih banyak, tetapi kemungkinan meminjam pada masa paceklik lebih sedikit. Dalam pengelolaan *Lumbung Paceklik* ini sistemnya terbalik dibandingkan hubungan fungsionalnya dengan pemerintah, seperti apa yang digambarkan oleh Sosrodi-

hardjo (2011: 48) bahwa keluarga berlahan luas membayar kewajiban banyak tetapi juga memperoleh hak lebih banyak. Akan tetapi sistem sosial masyarakat segitiga hilir, kelompok berada memiliki posisi donator semu bagi anggota yang masyarakat yang berekonomi miskin, sehingga hak kelompok berada dalam meminjam uang atau bahan pangan di *lumbung paceklik* belum tentu memiliki hak pinjam tinggi, bahkan tidak pernah meminjam.

Hubungan dengan Pemerintah Setempat:

Sistem pemerintah desa di kawasan Segi Tiga Hilir tidak berbeda dengan sistem pemerintah desa pada umumnya di Indonesia, yang berbeda hanyalah sistem implementasi sikap hubungan antara aparat dan warga. Kesempatan tertinggi yang pernah dicapai oleh masyarakat Segi Tiga Hilir dalam jabatan pemerintahan setempat adalah kepala desa. Hubungan fungsional aparat dan warga sangat egaliter, yang memang telah dikenal dari basis sistem keluarga. Kebijakan pembangunan desa selalu diserap dari aspirasi masyarakat, hubungan fungsional aparat dan warga sejak RT sampai Kepala Desa ada dalam suasana dialogis.

Pelayanan administrasi kependudukan lebih bersifat kekeluargaan, warga bisa dilayani kapan dan di mana saja, di rumah aparat atau di kantor desa, di pagi-siang-sore hari, tidak terikat jam kerja. Fungsi aparat lebih bersifat *pangemong praja* dibandingkan pemerintah formal. Atribut kekuasaan lebih luruh dalam hubungan fungsional aparat dan warga seperti konsep Soetardjo dalam *manunggaling kawulo gusti* (dalam Sosrodihardjo, 2011: 12-15). Sikap kritis dan membantah sering ditunjukkan dalam merespons kebijakan “instruktif” pemerintah yang berkaitan dengan desa tempat masyarakat Segi Tiga Hilir berada, khususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah di atas kepala desa.

Namun sistem hubungan aparat dan warga tersebut hanya sampai pada tingkat kepala desa, di atas tingkat tersebut (karena biasanya sudah dijabat oleh orang yang bukan etnis Samin) hubungan fungsional tidak dapat diekspresikan lagi. Oleh karena itu, masyarakat Segi Tiga

Hilir apabila tidak dipaksa oleh keadaan, enggan meminta pelayanan administratif pada pejabat di atas kepala desa, bahkan kalau bisa mereka menghindari.

Sistem Kepercayaan Setempat: Kebanyakan masyarakat Segi Tiga Hilir belum menganut agama wahyu (yang secara umum dikenal sebagai Islam, Kristen, Budha, Hindu). Identitas Islam hanyalah terbatas pada apa yang tercantum dalam KTP. Namun demikian, ada tiga pegangan hidup, *tri purusa*, yang dipegang kuat dalam kehidupan mereka yaitu: (1) Percaya pada adanya Tuhan pencipta alam semesta (2) Jangan berkeinginan untuk memiliki hak orang lain secara tidak sah atau merugikan orang lain (3) Apabila mampu, menolong orang yang membutuhkan.⁹ Pegangan hidup tersebut meskipun tidak disertai dengan konsekuensi ibadah lahir dan formal seperti yang biasa dikenal dalam agama wahyu, tetapi warga masyarakat Segi Tiga Hilir akan merasa sempurna apabila dapat memenuhi tiga pegangan sederhana tersebut.

Masyarakat Segi Tiga Hilir juga percaya pada mitos-mitos tentang akan datangnya masa kesengsaraan dan kebahagiaan. Mitos tentang adanya ramalan leluhur yang memprediksi akan datangnya kesengsaraan apabila ada ikan memakan bunga kelapa (*iwak badher mangan manggar*) masih mengisi benak warga masyarakat Segi Tiga Hilir, khususnya kelompok tuanya. Juga mitos tentang akan datangnya kebahagiaan apabila sudah ada *Ratu Adil* (Stanley, 2014: 69). Sesembahan ritual banyak ditujukan pada leluhur yang dianggap menjadi *cikal bakal* mereka, diwujudkan dengan kunjungan rutin mereka ke makam setiap Senin sore atau Kamis sore bertepatan dengan hari Jawa Kliwon (*malem Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon*). Atau kepada dewi padi (Sri) dengan sesaji yang dibuat pada awal tanam dan panen, dan juga pada penguasa desa, sungai besar, pohon, dan perempatan jalan dalam manifestasi memberi sedekah kenduri tiap bulan, juga kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus yang menurut Geertz (2011: 19-37) menyebut sistem kepercayaan ini sebagai varian agama *abangan*.

Sistem keluarga, ekonomi dan kemasyarakatan, hubungan dengan pemerintah, dan kepercayaan setempat dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir tersebut saling berhubungan fungsional dalam mempertahankan eksistensi dan integrasi hidup mereka melewati beberapa generasi. Hubungan antarsistem tersebut juga menjadi karakteristik spesifik sebuah struktur sosial yang membedakan masyarakat Segi Tiga Hilir dengan masyarakat sekitarnya, dan menjadi *defense mechanism* dalam meneguhkan sikap, misalnya tidak berminat berurbanisasi dan meraih kedudukan formal seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa dari daerah pertanian berlahan kering pada umumnya, dan bangga dengan eksistensi diri mereka.

Timbulnya Faktor Pengubah: Hubungan fungsional antarsistem dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir yang berjalan seimbang, teratur, dan dalam suatu kesatuan tersebut tiba-tiba terusik oleh adanya suatu berita kebijakan dari pemerintah yang isinya akan menjadikan kawasan mereka sebagai lokasi pembangunan waduk irigasi besar. Pemaknaan masyarakat Segi Tiga Hilir dari basis sistem yang mereka kenal, kebijakan tersebut sangat instruksional, jauh dari tradisi sistem hubungan dengan pemerintah setempat (egaliter) yang selama ini mereka pahami, apalagi adanya konsekuensi bahwa mereka harus pindah dari tempat tinggalnya, bertransmigrasi atau pindah ke mana saja mereka suka dengan uang sendiri.

Namun kebijakan pemerintah tetaplah kebijakan, terlepas dari respons dari masyarakat Segi Tiga Hilir, pembangunan waduk yang kemudian dinamakan Kedungombo tetap dilaksanakan dan mulai operasi tahun 1989, setelah melalui berbagai ketegangan. Dari data sekunder tentang 300 kepala keluarga yang bertindak sebagai responden pada waktu prakondisi, 11 (4 persen) responden bersedia transmigrasi, 37 (12 persen) responden bertahan di tempat tinggal semula, dan 252 (83 persen) menolak transmigrasi dengan memanfaatkan kompensasi ganti rugi tanah untuk mencari tempat tinggal baru di lokasi yang berdekatan dengan waduk.⁶ Dengan demikian

benar menurut persepsi fungsionalisme struktural (dalam Lauer, 2013: 106), bahwa faktor pengubah tersebut datangnya dari luar struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir, yaitu adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk membangun waduk irigasi Kedungombo.

Hubungan antarsistem yang teratur, seimbang, dan bersatu, kemudian membawa ke arah pemahaman sekilas, bahwa masyarakat yang dipahami menurut fungsionalisme struktural cenderung stabil dan statis. Namun Parsons (2014: 230-231) menegaskan, bahwa *teori tindakan* sama-sama memperhatikan antara persyaratan stabilitas dan perubahan, karena dalam mempelajari mekanisme stabilitas juga harus mempelajari mekanisme pengubah, hanya pemahamannya harus melalui struktur dalam masyarakat.

Dalam tujuh ciri umum tentang fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Van Den Berghe (Demerath, 2011: 294-295), terdapat dua ciri yang menyangkut perubahan sosial. Pertama, perubahan berlangsung secara lambat dan lebih merupakan penyesuaian diri. Kedua, perubahan yang merupakan hasil penyesuaian terhadap apa yang terjadi di luar masyarakat bersangkutan, melalui penemuan internal. Neil Smelser (dalam Cuff et. al, 2014: 61) berpendapat, karena berbasis pada kestabilan dan keteraturan tersebut, biasanya perubahan sosial dalam konsep fungsionalisme struktural selalu dimulai dengan ketegangan (*strain or tension*). Dalam konteks masyarakat segitiga hilir, perubahan sosial masyarakat menemui kebenarannya, karena perubahan masyarakat segitiga hilir dimulai dengan adanya ketegangan karena adanya kebijakan dari pemerintah untuk membangun waduk irigasi besar yang menggusur tempat tinggalnya.

Pos-kondisi: Sejak waduk Kedungombo dioperasikan, masyarakat Segi Tiga Hilir mengalami pergeseran demografis yang berkisar pada rentang 15-25 kilometer dari tempat tinggal semula. Kondisi alat produksi yang berupa lahan tanah juga mengalami perbedaan drastis, kalau dulu bisa ditanami padi sekarang tidak bisa karena kualitas kesuburan tanah di tempat yang baru lebih buruk. Lahan tanah yang dimiliki

masyarakat Segi Tiga Hilir juga menurun rata-rata 35 persen, apabila dihitung dengan nilai belanja dan uang konkret.⁷

Produk pertanian pascagenangan yang mampu dihasilkan oleh mereka hanyalah ketela, jagung, dan wijen. Suasana lingkungan yang dahulu berupa lahan tanah agraris berubah menjadi hamparan air waduk (aquaris). Perubahan sistem-sistem dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir tersebut adalah dalam rangka adaptasi lingkungan, sebagaimana menurut persepsi Fungsionalisme Struktural (Van Den Berghe dalam Demerath, 2011: 294-295), dalam rangka menuju pada keseimbangan, keteraturan, dalam mempertahankan eksistensi mereka. Dari pengamatan selama 10 tahun sejak waduk Kedungombo dioperasikan pada tahun 1989, perubahan hubungan fungsional antarsistem yang terjadi pada struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Sistem Keluarga: Apabila pada masa pra-kondisi kepala keluarga menjadi sentral tanggung jawab ekonomi seluruh anggota keluarga, pada masa pos-kondisi anggota keluarga terutama yang telah dewasa secara ekonomi lebih otonom. Perubahan tersebut disebabkan ditemukannya lapangan pekerjaan baru yang berbasis tidak pada lahan tanah keluarga secara turun temurun sehingga ada tradisi untuk menyerahkan pendapatan dari hasil kerja pada kepala keluarga, tetapi berbasis pada lahan air waduk milik umum sehingga tidak harus menyerahkan pendapatan dari hasil kerjanya pada kepala keluarga.

Pergeseran demografis dan sosialisasi dengan masyarakat Jawa yang menyebabkan masyarakat Segi Tiga Hilir sekarang tidak lagi mendominasi komunitas sosial, juga membawa konsekuensi banyak warga dari etnis Samin yang kemudian menikah dengan warga dari komunitas Jawa. Selama sepuluh tahun observasi, sudah ada 21 warga keturunan etnis Samin yang menikah dengan warga dari etnis Jawa. Letak persebaran tempat tinggal di tempat yang baru yang terpisah-pisah, meskipun masih dalam lingkungan satu desa, juga menyebabkan jalinan antaranggota ke-

luarga yang dulu *extended* menjadi terbatas pada satu generasi vertikal ke bawah dan ke atas.

Sistem Ekonomi dan Kemasyarakatan:

Dalam masa transisi ke bentuk lingkungan alam baru tersebut, kelompok yang semula berlahan tanah luas dan pedagang masih berfungsi sebagai katup pengaman ekonomi masyarakat Segi Tiga Hilir. Dengan keuangan modal yang dimiliki, mereka mampu jadi pioneer untuk melakukan penemuan internal dalam bentuk alat produksi guna menopang kehidupan mereka di tempat yang baru (faktor ini juga yang dikonsepsikan oleh persepsi Strukturalisme Fungsional dalam memandang perubahan sosial). Perubahan sarana produksi yang semula dalam bentuk lahan pertanian ke bentuk lahan air, karena lahan pertanian di tempat baru tidak *menjanjikan* lagi, telah mendorong mereka untuk mengubah alat produksi yang semula dalam bentuk cangkul, garu, dan bajak ke bentuk jarring, keramba, bubu, dan sampan. Kemampuan beradaptasi tersebut segera diikuti oleh kelompok yang semula petani berlahan sempit (dengan penghasilan yang subsistens) untuk mengikuti cara produksi pendahulunya, tanpa merasa takut gagal.

Perubahan sarana dan alat produksi tersebut menyebabkan struktur dalam sistem ekonomi masyarakat Segi Tiga Hilir juga mengalami perubahan. Kalau dulu ekonomi jasa dengan pertukaran tenaga kerjanya lebih dominan, sekarang digeser dengan ekonomi uang. Sistem penjualan hasil produksi (ikan) yang langsung dapat dijual kepada pembeli menyebabkan uang lebih cepat didapat, upah dalam bentuk uang juga mudah diberikan, tidak lagi sekedar numpang hidup dengan jaminan makan dan upah sekadarnya. Sistem ekonomi tersebut menyebabkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja berpenghasilan riil, dalam arti mempunyai dan memegang penghasilan sendiri serta tidak terikat oleh kepala keluarga. Posisi ekonomi anggota keluarga dalam sistem keluarga menjadi lebih otonom, karena kalau tidak bekerja dalam satuan keluarga lain mereka juga dapat membuat alat produksi sendiri dengan lahan air waduk milik umum, sebagai nelayan, peternak keramba, dan

pekerja perahu penyebarangan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Segi Tiga Hilir ke daerah lain.

Kemampuan masyarakat Segi Tiga Hilir yang semula beradaptasi dengan lingkungan tersebut disebabkan mereka sebelumnya telah memiliki elemen dasar sebagai nelayan sungai sebagai profesi minor di samping profesi mayor sebagai petani. Elemen dasar tersebut yang menurut Auguste Comte (dalam Etzioni, 2013: 51) mampu mendorong masyarakat ke arah perubahan sosial. Perubahan pada alat dan sarana produksi yang menyebabkan perubahan pada sistem dan struktur ekonomi tersebut juga membawa perubahan pada organisasi ekonomi setempat, yang semula berbentuk *Lumbung Paceklik* dengan sistem iur padi, menjadi *Mina Mukti* dengan sistem iur uang.

Sistem Hubungan dengan Pemerintah Setempat: Pergeseran demografis masyarakat Segi Tiga Hilir ke tempat yang baru membawa konsekuensi status kependudukan mereka dalam struktur sosial masyarakat setempat berubah dari penduduk asli ke status komunitas pendatang. Mundurnya tokoh-tokoh formal dari etnis Samin yang dulu pernah berada dalam struktur pemerintahan di lingkungan masyarakat Segi Tiga Hilir karena hilangnya wilayah otoritas mereka oleh genangan waduk Kedungombo, menyebabkan mereka tidak dapat lagi mendominasi sistem dalam hubungannya dengan pemerintah setempat. Dalam struktur pemerintahan desa ke bawah mereka tidak lagi menjadi sistem tetapi sub sistem. Sebab, kesempatan berada dalam struktur jabatan formal hanya sampai pada tingkat RT, jabatan di atas RT sudah diduduki oleh orang-orang dari komunitas etnis Jawa, sehingga hubungan dengan pemerintah setempat tidak dapat lagi diwarnai dengan sistem egaliter seperti dulu yang mereka kenal, tetapi sistem hubungan yang formalistik.

Struktur sosial antarstatus warga biasa dan aparat pemerintahan, terutama sejak dari RW ke atas, tidak lagi *functional stratified* tetapi *formal stratified*. Masyarakat Segi Tiga Hilir memahami aparat tidak lagi sebagai *pamong projo* yang

setiap waktu bisa di ajak bicara dan dimintai pelayanan kapan dan di mana saja, tetapi sebagai orang yang harus dihormati dalam stratifikasi derajat tertentu. Salah satu bentuk konkret dari sistem tersebut adalah pelayanan administrasi kependudukan pada saat poskondisi hanya dapat dilayani pada saat jam kerja saja dan di kantor pemerintahan desa. Diawali dari sikap masyarakat Segi Tiga Hilir sebelum menempati pemukiman baru yang menolak transmigrasi, menjadikan sistem hubungan dengan aparat pemerintah di tempat tinggal yang baru menjadi lebih formal dan tidak egaliter.

Respons terhadap sistem tersebut sering diungkapkan oleh masyarakat Segi Tiga Hilir dalam sikap ketaatan semu, atau “sabotase”⁸ dalam arti apabila ada perintah bersih-bersih (desa) lalu diterjemahkan menjadi membersihkan segala hal, baik yang tidak berguna maupun yang berguna. Sikap yang sering “kritis” tersebut yang kemudian menjadikan masyarakat Segi Tiga Hilir sering memperoleh sebutan sebagai masyarakat *waton suloyo* dan *BAKMI* (*bosenan, aras-arasan, keset, malu dan isinan*) oleh aparat pemerintah setempat. Sebuah sebutan yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan realitas karakteristik etnis Samin.

Sistem Kepercayaan Setempat: Perubahan lingkungan dan alam Masyarakat Segi Tiga Hilir juga menyebabkan hilangnya sarana tradisi kegiatan dalam mengekspresikan kepercayaan setempat. Pemujaan pada leluhur yang diekspresikan dengan seringnya berkunjung ke makam-makam yang menjadi *cikal bakal* atau yang ditokohkan terpaksa tidak dapat diteruskan lagi karena makam-makam tersebut tenggelam oleh air waduk. Kepercayaan kepada Dewi Sri, sebagai dewi kesuburan (padi) yang diekspresikan dengan pemberian sesaji pada masa awal tanam dan panen, juga tidak dapat diteruskan karena sarana kepercayaan (sawah) yang sekarang dimiliki oleh masyarakat Segi Tiga Hilir sudah tidak dapat memberi mereka hasil padi lagi, bahkan tidak subur.

Kepercayaan pada *danyang-danyang* desa, yang menguasai sungai besar, pohon besar,

perempatan jalan, sudut-sudut desa juga tidak dapat direplikasikan di desa tempat mereka tinggal yang baru. Sebab, desa tersebut bukan peninggalan nenek moyangnya, sehingga kenduri bulanan dianggap tidak perlu dilakukan. Bahkan, genangan air waduk besar yang dulunya juga dipercayai sebagai salah satu tempat sakral dan mempunyai *danyang*, tidak dapat diterapkan pada kehadiran waduk baru yang lebih besar, yaitu Kedungombo. Masyarakat Segi Tiga Hilir sebaliknya memaknai waduk tersebut sebagai “simbol perjuangan” hidup baru, ke dalam hubungan fungsional sistem-sistem baru, dan struktur sosial yang baru.

Sistem kepercayaan setempat tersebut hanya tinggal di dalam benak generasi tuanya. Salah satu mitos yang masih kukuh dan makin kuat hadir di benak masyarakat Segi Tiga Hilir, terutama kelompok tuanya, adalah akan datangnya (dan kemudian telah datang) masa kesulitan yang ditandai dengan *iwak badher mangan manggar*, karena terbukti bahwa benar ada ikan yang memakan bunga kelapa, yaitu setelah waduk Kedungombo dioperasikan, ikan-ikan banyak yang makan bunga kelapa yang terbenam di dalam air waduk. Harapan yang ditunggu masyarakat Segi Tiga Hilir kemudian adalah datangnya *Ratu Adil* yang menandai datangnya masa kebahagiaan kembali. Namun di lain pihak, ada perubahan sistem kepercayaan pada generasi anak-anaknya. Sosialisasi dengan lebih banyak komunitas Jawa menyebabkan konsep kepercayaannya tidak terisi oleh informasi satu arah dari orangtuanya, tetapi juga dari pendidikan dasar dan pengaruh ketetanggaaan, sehingga banyak anak-anak dari masyarakat Segi Tiga Hilir yang belajar mengaji (Islam) sejalan dengan tersedianya sarana dan guru ibadah di tempat yang baru.

Namun perubahan sistem kepercayaan (ke Islam) tersebut tidak banyak terjadi pada kelompok tuanya, sehingga mereka rawan terhadap sebutan yang selalu dikait-kaitkan dengan partai terlarang. Sebutan yang, sebenarnya, juga tidak berdasarkan pemahaman etnis, tetapi hanya demi mempermudah menghitamputihkan kelompok masyarakat yang sering “kritis” terhadap kebi-

jakan yang bersifat instruksional dari pemerintah setempat.

D. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penelitian melalui pengamatan dan penggunaan *key-informant* secara *snowball* tentang masyarakat Segi Tiga Hilir sejak setahun pra-kondisi dan sepuluh tahun pos-kondisi dibangunnya waduk Kedungombo, terutama dilihat dari persepsi Fungsionalisme Struktural, perubahan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem yang menonjol dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir adalah sistem keluarga, ekonomi dan kemasyarakatan, hubungan dengan pemerintah setempat, dan kepercayaan setempat. Hubungan fungsional antarsistem tersebut telah menguatkan eksistensi masyarakat Segi Tiga Hilir dalam beberapa generasi. Seperti teori Talcott Parson, bahwa awal perubahan sosial masyarakat disebabkan oleh faktor dari luar. Masyarakat Segi Tiga Hilir mengalami hal yang sama, perubahan disebabkan oleh faktor dari luar, yaitu kebijakan pemerintah untuk membangun waduk Kedungombo di kawan tempat tinggal mereka. Perubahan yang berdampak pada alam lingkungan (dari agraris ke aquaris) tersebut menyebabkan hubungan fungsional antarsistem dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir juga mengalami perubahan, dari sistem menjadi sub sistem.

Sesuai dengan teori Neil Smelser, bahwa perubahan pada masyarakat selalu diwarnai dengan ketegangan (*strain or tension*) karena berangkat dari kondisi hubungan fungsional antar sistem yang sudah teratur, stabil, dan dalam keseimbangan, yang kemudian diikuti dengan kebutuhan perubahan akan alat produksi. Masyarakat Segi Tiga Hilir juga mengalami hal yang sama, ketegangan sebelum mereka pindah tempat tinggal dan diikuti dengan kebutuhan akan alat produksi baru dalam menyikapi lingkungan alam yang baru berupa hamparan air. Perubahan dari sistem ekonomi (petani ke nelayan), pertukaran jasa ke standar uang, menyebabkan perubahan

pada sistem keluarga (dari ekonomi keluarga yang tersentralisasi ke kepala keluarga, menjadi lebih otonom ke setiap anggota keluarga). Pergeseran demografi masyarakat Segi Tiga Hilir juga telah mengubah sistem perkawinan keluarga yang semula internal sesama etnis ke eksternal.

Perubahan pada kondisi alam juga telah mengubah sistem tradisi kegiatan dalam mengekspresikan kepercayaan setempat, yaitu hilangnya sarana persembahan leluhur berupa makam-makam; hilangnya tradisi kenduri desa bulanan untuk persembahan danyang-danyang desa karena tidak adanya fungsi ritual desa di tempat yang baru; dan hilangnya tradisi persembahan pada dewi padi (Sri) karena fungsi ritual sawah di tempat baru tidak seritual sawah di tempat asal (tidak subur dan tidak dapat menghasilkan padi). Perubahan demografis, dengan berpindahnya masyarakat Segi Tiga Hilir ke tempat tinggal baru menyebabkan yang semula merupakan sebuah struktur sosial yang di dalamnya memiliki hubungan fungsional sistem-sistem tersendiri, menjadi masyarakat subsistem dalam sistem struktur sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat di tempat tinggal yang baru dengan dominasi etnis Jawa. Perubahan demografi tersebut berakibat sistem hubungan fungsional warga dan aparat pemerintahan yang dulu egaliter menjadi terstratifikasi secara formal menurut budaya masyarakat di tempat yang baru.

Sesuai dengan persepsi fungsionalisme struktural, bahwa perubahan sosial antarsistem dalam struktur sosial masyarakat Segi Tiga Hilir tidak terjadi secara radikal (seperti persepsi teori konflik), tetapi sedikit demi sedikit (evolusi), dalam menuju ke kondisi hubungan fungsional antarsistem baru yang teratur, integratif, dan seimbang. Keberhasilan mencari keseimbangan baru yang dilakukan masyarakat Segi Tiga Hilir tersebut tergantung dari adanya sikap empati dari factor pengubah semula, yang berarti butuh kehadiran sistem-sistem baru dalam bentangan struktur sosial yang lebih besar, menuju pada kemanfaatan dampak pembangunan waduk Kedungombo untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat Segi Tiga

Hilir, dengan sedapat mungkin meminimalisasi dampak negatifnya.

Pustaka Acuan

- Chamber, Robert (2010). *Membangun Masyarakat dari Belakang*. Jakarta: Rajawali.
- Cuff, E.C. et al; 2014; *Perspective in Sociology*; London, George allen & Unwin Co.
- Demerath, N.J.; 2011; *System, Change, and Conflict*; New York, Free Press.
- Etzioni, Amitai, and Eva Etzioni-Halevy; 2013; *Social Changes: Sources, Patterns, and Consequences*; New York, Basic Book Inc. Publisher.
- Geertz, Clifford; 2011; *Abangan, Santri, Priyayi, dalam Masyarakat Jawa*; Jakarta, Pustaka Jaya.
- Goode, William J.; 1991; *Sosiologi Keluarga*; Jakarta, Radar Jaya.
- Moore, J.F. (2010). *Community and Social Changes*. London: Sage.
- Miles, Ian; 2010; *Social Indication for Human Development*; London, Frances Printer Publiser.
- Lauer, Robert H.; 2013; *Perspektif tentang Perubahan Sosial*; Jakarta, Rineka Cipta.
- Parsons, Talcott and Edward A. Shils; 2014; *Toward General Theory of Action*; New York, Herper & Row.
- Poloma, Margaret M.; 2014; *Sosiologi Kontemporer*; Jakarta, Rajawali Pers.
- Ritzer, George; 2011; *Sociological Theory*; New York, The McGraw-Hill.
- Sosrodihardjo, Soedjito; 2011; *Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Pedesaan*; Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Stanley; 2014; *Seputar Kedungombo*; Jakarta, Elsam.
- Svalastoga, Kaare; 2013; *Deferensiasi Sosial*; Jakarta, Bina Aksara.

Footnotes

- ¹⁾ Di antaranya ganti rugi tanah yang terkena genangan waduk milik masyarakat setempat, yang kemudian di simpan di pengadilan negeri setempat sebagai uang konsinyasi.

- ²⁾ Disebut segitiga Hilir karena di wilayah tempat tinggal masyarakat yang terdampak genangan, kemudian menjadi hilir tiga sungai besar yang memasok air ke Waduk Kedungombo, yaitu sungai Jragung, Tuntang dan Serang.
- ³⁾ Data sekunder dikompilasikan dari monografi desa setempat.
- ⁴⁾ Almarhum Sadjono Jatiman, pembimbing penelitian Masyarakat Segi Tiga Hilir, juga mengaku keturunan dari etnis Samin. Beliau mengaku sebagai sedikit orang-orang keturunan Samin yang “menyimpang” dari tradisi, menjadi orang Samin yang bekerja di sektor formal, sebagai dosen FISIP-UI jurusan Sosiologi.
- ⁵⁾ Keterangan dari To Pawiro, ketua RT setempat. Wawancara dilakukan siang hari ketika To Pawiro sedang menikmati hari sehabis be-kerja di tanah pertanian di pagi harinya.
- ⁶⁾ Dalam tradisi Jawa pada umumnya, sistem bagi hasil buruh pemanen sawah dan pemilik sawah berlaku pembagian antara perdelapan dan perduabelas.
- ⁷⁾ Keterangan dari Bapak Parno, petani, warga masyarakat Segi Tiga Hilir yang mengaku bukan dari keturunan etnis Samin.
- ⁸⁾ Keterangan Bapak Saadi, pedagang, sekretaris organisasi ekonomi desa, *Lumbung Paceklik*
- ⁹⁾ Keterangan dari Bapak Sukilan, petani, tokoh yang dituakan dalam lingkungan masyarakat Segi Tiga Hilir.
- ⁶⁾ Menurut keterangan Sutar, pekerja perahu penyeberangan, yang bersedia transmigrasi adalah satuan keluarga yang tidak berasal dari etnis Samin.
- ⁷⁾ Keterangan dari Bapak Saroto, ketua RT, nelayan setempat.
- ⁸⁾ Soedjito Sosrodihadjo (1987: 56), pernah menggambarkan sedikit tentang sikap masyarakat Samin ini, meskipun dalam konteks yang berbeda.

